

AS Kritik Rusia dan Ancam Jatuhkan Sanksi Baru pada Korut

WASHINGTON (IM) - Menteri Luar Negeri baru Amerika Serikat (AS), Antony Blinken menuturkannya, pihaknya akan mempertimbangkan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut). Dia juga mengkritik Rusia dan mengisyaratkan respon keras atas tindakan Rusia terhadap demonstran dan penangkapan Alexei Navalny.

Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, Blinken mengatakan bahwa alat yang ditujukan untuk denuklinsasi Semenanjung Korea, termasuk sanksi tambahan dalam koordinasi dengan sekutu AS, serta insentif diplomatik yang tidak dia sebutkan.

Lalu, Blinken menyinggung soal Rusia, dengan mengatakan bahwa dia sangat terganggu oleh tindakan keras terhadap pengunjuk rasa dan

penangkapan orang-orang di seluruh negeri. Ia menuntut pembebasan pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny.

"Pemerintah Rusia membuat kesalahan besar jika mereka yakin ini tentang kami," katanya dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Reuters pada Selasa (2/2).

"Ini tentang mereka. Ini tentang pemerintah. Ini tentang rasa frustrasi rakyat Rusia terhadap korupsi, dengan otokrasi, dan saya pikir mereka perlu mencari ke dalam, bukan ke luar," sambungnya.

Blinken kemudian mengatakan dia sedang meninjau tanggapan atas tindakan terhadap Navalny, serta campur tangan Rusia dalam pemilihan umum AS pada tahun 2020 dan dugaan pemberian hadiah kepada milisi untuk memburu tentara AS di Afghanistan. ● gul



IDN/ANTARA

KEBEBASAN UMAT ISLAM DI XINJIANG UNTUK BERIBADAH

Mamat Mamatmin (keempat kiri) selaku Imam Masjid Konashehar, Kota Moyu, Daerah Otonomi Xinjiang, Tiongkok memberikan keterangan pers di Beijing, Tiongkok, Senin (1/2). Mamat menjelaskan bahwa umat Islam di Xinjiang, khususnya etnis Uighur mendapat jaminan kebebasan beribadah dan belajar agama oleh otoritas setempat.

Dewan Keamanan PBB Akan Membahas Situasi di Myanmar

Kudeta itu sebagai pukulan serius bagi reformasi demokrasi.

NEW YORK (IM) - Dewan Keamanan (DK) PBB akan bertemu untuk membahas perkembangan dan potensi respons internasional terhadap kudeta militer di Myanmar. Militer merebut kekuasaan pada Senin kemarin dan menahangi anggota pemerintah Myanmar, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Usutan Inggris untuk PBB, yang memegang jabatan presiden bergilir DK PBB untuk bulan Februari, mengatakan ia berharap untuk mengadakan diskusi yang konstruktif. "Dewan akan melihat berbagai langkah, dengan gagasan menghormati keinginan rakyat

yang diungkapkan dalam pemungutan suara dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada wartawan. "Kami ingin memper-timbangkan langkah-langkah yang akan menggerakkan kami menuju tujuan itu," kata Woodward, sambil menambahkan bahwa tidak ada langkah-langkah spesifik yang sedang dibahas saat ini, seperti dikutip dari DW, Selasa (2/2).

Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mengatakan kepada DW bahwa komunitas internasional harus bertindak dalam bahasa

yang dimengerti oleh junta militer Myanmar. "Dan kami tahu dari pengalaman mereka memahami bahasa sanksi ekonomi," kata Andrews. "Anda tidak menggulingkan demokrasi yang masih muda. Anda tidak menyerang seluruh orang dengan kudeta militer," serunya. "Apa yang kami miliki di Myanmar adalah penguncian yang sangat sistematis terhadap orang-orang yang percaya pada demokrasi, yang telah memajukan hak asasi manusia. Para pemimpin pemerintah dari Aung San Suu Kyi dan banyak rekannya dalam penggerebekan dini hari ini, pemutusan komunikasi kemarin (pada hari Minggu) di seluruh negeri, pengurangan para pemimpin yang bisa meningkatkan oposisi di jalanan. Jadi ini

benar-benar kudeta. Mereka telah mengunci negara ini," kata pelapor khusus PBB itu. Terkait pertemuan ini, masih harus dilihat bagaimana Tiongkok dan Rusia sebagai anggota DK PBB akan bertindak dalam pertemuan tersebut. Kedua kekuatan dunia itu sebagian besar melindungi Myanmar dari tindakan signifikan dari DK PBB menyusul tindakan keras militer pada 2017 lalu yang menyebabkan lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh. Rusia dan Tiongkok sama-sama memiliki hak veto di DK PBB, bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Tiongkok sejauh ini menolak untuk mengkritik kudeta di Myanmar dan malah meminta semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan.

Tentara Myanmar merebut kekuasaan negara itu dalam kudeta tak berdarah, menangkap Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya yang terpilih secara demokratis. Sementara itu, pemerintahan sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, mendesak rakyat di seluruh negeri itu untuk menentang kudeta yang dilakukan militer. Aung San Suu Kyi dan pejabat terkemuka lainnya ditahan sehari sebelum anggota parlemen terpilih pada November lalu dijadwalkan untuk memulai masa jabatan parlemen baru. "Saya mendesak rakyat untuk tidak menerima ini, untuk merespons dan sepenuh hati memprotes kudeta oleh militer. Hanya rakyat yang pebling," bunyi pernyataan yang menggunakan nama Suu Kyi tetapi tidak ada tanda tangannya. ● tom

Iran Minta Bantuan Eropa Kembali AS ke Perjanjian Nuklir

TEHERAN (IM) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Mohammad Javad Zarif, meminta Uni Eropa (UE) untuk mengoordinasikan sinkronisasi pengembalian Washington dan Teheran ke dalam perjanjian nuklir 2015. Permintaan ini datang setelah adanya kebuntuan diplomatik tentang siapa yang akan bertindak terlebih dahulu. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyarankan dukungan untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015, tetapi bersikeras bahwa Teheran pertama-tama harus kembali patuh sepenuhnya dengan mencabut langkah-langkah yang telah diambil sebagai bentuk protes atas sanksi besar yang dijatuhkan oleh pendahulunya Donald Trump.

segera siap untuk menanggapi. Waktunya bukan masalahnya," imbuhnya. Zarif dalam wawancaranya mengatakan bahwa Iran dapat kembali ke komitmen sebelumnya dalam waktu kurang dari sehari. "Beberapa mungkin memakan waktu beberapa hari atau minggu, tetapi tidak akan memakan waktu lebih lama bahwa Amerika Serikat akan menerapkan perintah eksekutif yang diperlukan untuk mengembalikan minyak Iran, perbankan, transportasi, dan area lain yang dilanggar Presiden Trump, kembali. beroperasi," tutur Zarif. Trump keluar dari kesepakatan yang dinegosiasikan di bawah mantan presiden Barack Obama, malah bersumpah untuk mengecek ekonomi Iran dan mengurangi pengaruhnya di sekitar Timur Tengah. Pemerintahan Biden berpendapat bahwa tindakan Trump menjadi bumerang, dengan Iran menjauh dari kesepakatan nuklir dan hanya mengintensifkan penentangannya terhadap kepentingan AS, dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken memperingatkan bahwa Iran sekarang dapat menghasilkan bahan fisil yang cukup untuk senjata nuklir dalam beberapa bulan. Tapi Blinken sekali lagi memperingatkan bahwa kembali ke kesepakatan nuklir tidak akan cepat. "Jika memutuskan untuk kembali ke perjanjian - itu mungkin memakan waktu, maka akan butuh waktu bagi kami untuk menilai apakah mereka (Iran), pada kenyataannya, telah memenuhi kewajiban mereka," kata Blinken kepada NBC News dalam sebuah wawancara yang disiarkan Senin.

Seperti diketahui, Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir 2015 pada 2018. Langkah itu disusul dengan penajatan sejumlah sanksi yang disebut sebagai tekanan maksimum. Zarif, yang sebelumnya menuntut diakhirinya sanksi sebelum tindakan Iran, menawarkan jalan ke depan selama wawancara di CNN International. "Anda tahu dengan jelas bahwa pada dasarnya ada mekanisme untuk menyinkronkannya, atau mengoordinasikan apa yang bisa dilakukan," katanya kepada pewawancara Christiane Amanpour seperti dikutip dari France24, Selasa (2/2). Zarif mengatakan bahwa kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell harus berperan dalam posisinya sebagai koordinator perjanjian 2015 - yang juga mencakup Inggris, Prancis dan Jerman serta Rusia dan Tiongkok. "Borrell dapat menyusun korografi tindakan yang perlu diambil oleh Amerika Serikat dan tindakan yang perlu diambil oleh Iran," ujar Zarif. "Amerika Serikat perlu kembali patuh dan Iran akan

Puluhan Mantan Pejabat Era Bush Keluar dari Partai Republik

WASHINGTON (IM) - Puluhan mantan pejabat era pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush keluar dari partai Republik. Mereka kecewa pada kegagalan anggota partai yang tidak mengancam Donald Trump terutama usai klaim-klaim palsu sang mantan Presiden AS mengenai kecurangan pemilu 2020. Terlebih, klaim-klaim tersebut diduga jadi pemicu serangan masyarakat sipil ke Capitol Hill bulan lalu. Para anggota Partai Republik yang keluar termasuk mantan pejabat tinggi pemerintahan Bush. Mereka mengatakan sempat berharap kekalahan Trump dapat menggerakkan pemimpin partai untuk menjauh dari pengesahan real-estate itu dan mengancam klaim-klaim palsunya. Namun sebagian besar anggota parlemen dari Partai Republik masih berpihak pada Trump. Para mantan pejabat itu mengatakan mereka sudah tidak lagi mengenal partai mereka sendiri. Sejumlah mantan pejabat keluar dari keanggotaan partai sementara yang lainnya mendaftarkan diri sebagai independen. "Partai Republik yang saya kenal sudah tidak ada lagi, saya membutuhkan kelompok pemujahan Trump," kata mantan Wakil Menteri Keuangan bidang Terorisme dan Intelijen Finansial pemer-

intahan Trump, Jimmy Gurulé, Senin (1/2). Mantan pejabat komunikasi Gedung Putih pemerintahan Bush, Christopher Purcell mengatakan, sekitar 60 hingga 70 mantan pejabat pemerintahan Bush memutuskan keluar atau memutuskan hubungan dengan Partai Republik. "Setiap hari jumlahnya terus bertambah," kata Purcell. Banyak di antara mantan pejabat itu sudah mengabdikan selama puluhan tahun di Partai Republik. Banyaknya jumlah pembelot menunjukkan tumbuhnya konflik di dalam partai dan bagaimana warisan Trump memecah belah partai tersebut. Partai itu kini beris dua kelompok, satu kelompok moderat atau independen yang muak dengan cengkraman Trump pada pejabat terpilih dan pada pendukung setia di Partai Republik. Berdasarkan jajak pendapat serta pernyataan dari petinggi partai dan pakar perpecahan itu akan menyulitkan Partai Republik memenangkan pemilihan nasional. Perwakilan Trump tidak menanggapi permintaan komentar mengenai hal ini. Perwakilan pejabat-pejabat pemerintahan Bush juga belum menanggapi permintaan komentar. Selama Trump berkuasa, Bush membuat pernyataan yang jelas untuk 'pensiun dari politik'.

Beberapa jam sebelum pendudukan Trump menyerang Capitol Hill. Lebih dari setengah anggota Partai Republik di Kongres yakin delapan orang Senator dan 139 anggota House of Representative memilih untuk menolak meresmikan kemenangan Presiden Joe Biden. Sebagian besar Senator Partai Republik juga mengindikasikan tidak akan mendukung pemakzulan Trump sehingga belum dapat dipastikan apakah mantan presiden itu bersalah dalam sidang di Senat. Pada 13 Januari lalu House mendakwa Trump 'menghasut pemberontakan'. Sidang pemakzulan 9 Februari mendatang membuat Trump satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika yang dua kali dimakzulkan. Keengganan pemimpin partai mengancam Trump menjadi dorongan terakhir mantan pejabat Partai Republik meninggalkan partai tersebut. "Jika terus menjadi partainya Trump, banyak dari kami yang tidak akan kembali kecuali bila Senat memvonisnya bersalah dan menyingkirkan kanker Trump dari diri mereka sendiri, banyak dari kami tidak akan kembali memilih pemimpin Partai Republik," kata mantan Treasurer of the United States atau Bendahara Negara pemerintahan Bush, Rosario Marin. ● ans



IDN/ANTARA

UNJUK RASA WARGA MYANMAR DI JEPANG

Pengunjuk rasa Myanmar yang tinggal di Jepang membawa foto Aung San Suu Kyi saat mereka melakukan protes terhadap militer Myanmar setelah mengambil kekuasaan dari pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis dan menangkap pemimpinnya Aung San Suu Kyi, di United Nations University di Tokyo, Jepang, Senin (1/2).



IDN/ANTARA

PASIE RUMAH SAKIT PEMERINTAH INDIA

Seorang pasien duduk di tandu dan menunggu untuk perawatannya di sebuah rumah sakit yang dikelola pemerintah di Kolkata, India, Senin (1/2).

Protes Rektor yang Ditunjuk Erdogan, 159 Demonstran Ditahan

ISTANBUL (IM) - Polisi Turki menahan 159 orang atas aksi protes di Istanbul yang menentang penunjukan rektor baru oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan di salah satu universitas ternama di negara itu. Mahasiswa Universitas Bogazici di Istanbul memulai aksi protes mereka hampir sebulan yang lalu, dengan mengatakan penunjukan Melih Bulu sebagai rektor tidak demokratis. Sejumlah dosen di Bogazici juga memprotes pelantikan terhadap Bulu. Para pengunjuk rasa yang meneriakkan slogan-slogan seperti "Polisi, keluar" dan "Universitas adalah milik kita" terlibat bentrok dan berkelahi dengan polisi pada hari Senin (1/2).

Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), mengkritik penahanan para demonstran di Twitter. Ia lantas menyerukan Bulu untuk mengundurkan diri untuk mengakhiri situasi yang buruk. Walikota Istanbul Ekrem Imamoglu, juga dari CHP, mengatakan dia telah berbicara dengan pihak berwenang untuk menjalin dialog antara mereka dan para pengunjuk rasa, menambahkan dia akan bertemu dengan mahasiswa Bogazici pada Selasa waktu setempat untuk mendengarkan kekhawatiran mereka. Bulu, yang telah melamar menjadi kandidat Partai AK yang berkuasa dalam pemilihan parlemen 2015, adalah rektor pertama yang dipilih dari luar universitas sejak kudeta militer di Turki pada 1980, kata anggota fakultas Bogazici. Para pengunjuk rasa juga menuntut pembebasan empat orang yang telah ditahan setelah gambar mereka dibagikan di media sosial di mana mereka sedang meletakkan gambar di tanah yang mencampurkan ikonografi Islam yang sakral dengan simbol-simbol yang mendukung masalah LGBT. Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengatakan pada akhir pekan bahwa empat "penyimpang LGBT" telah ditahan, sementara Erdogan pada hari Senin memuji sayap pemuda Partai AK yang berkuasa karena bukan pemuda LGBT. ● gul

Dalam sebuah pernyataan, kantor Gubernur Istanbul mengatakan 159 orang kemudian ditahan karena tidak mengakhiri demonstrasi di depan Universitas Bogazici meskipun ada peringatan, dan menambahkan bahwa penyelidikan telah diluncurkan seperti dikutip dari Reuters, Selasa (2/2). Sebelumnya, lebih dari 100 polisi berkumpul di pintu masuk utama kampus. Mereka mengizinkan mahasiswa untuk masuk, memeriksa ID mereka, tetapi menyeru yang lain untuk pergi, termasuk beberapa anggota parlemen, terutama dari Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi. Trotoar di samping jalan menuju universitas dipagari, dan bentrokan kecil terjadi ketika beberapa pengunjuk rasa mulai bernyanyi dan berjalan menuju barikade polisi.